

**PERGULATAN DOKTRIN POLITIK NAHDLATUL ULAMA:
(Refleksi Masa kolonial Belanda, Jepang, Era Kemerdekaan, Orde Baru
Hingga Pasca Reformasi di Indonesia)**

Yayan Sahi,¹ Sofyan Jama,² Amran Hulubangga,³ Alexander Kaaba⁴

Prodi S2 PPKn Universitas Negeri Gorontalo,¹ Badan Pengawas Pemilu, Kabupaten Bone Bolango,²
Badan Pengawas Pemilu, Kabupaten Pohuwato,³ Badan Pengawas Pemilu, Kabupaten Gorontalo,⁴

Email:

yayansahi1999@gmail.com,¹ djamanakata82@gmail.com,² hulubanggaa@gmail.com,³
alexkaaba@gmail.com,⁴

Abstract:

The aim of this research is to understand the political doctrine struggles of Nahdlatul Ulama (NU) starting from the Colonial period, Japan, the Era of Independence, the New Order, to Post-Reformation in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with literature study as a secondary data source, including books, journals and previous research. Research findings show; (1) During the Dutch colonial period, NU's political doctrine reflected the "Wait and See" strategy, with a focus on protecting Islamic religious values, emphasizing Islamic identity in Indonesia, and collaborating with other Islamic organizations in the struggle for independence and justice. (2) During the Japanese colonial period, NU adapted to political changes. Initially they collaborated with Japan, but then became critical of Japanese policies, especially regarding seikeirei which was contrary to the Islamic principle of monotheism. NU resisted, used a diplomatic approach, and built a power base among Islamic boarding schools and kyai. (3) In the Independence Era, NU's political doctrine reflected adaptation to changing political situations. They support independence and Islamic values in a pluralist country, and play a role in government. Post-independence, NU faced various challenges, including relations with the government, national politics, and the role of religion in modern society. (4) In the New Order era, NU's political doctrine underwent changes, with a focus on social, religious, educational and da'wah activities. Even though some of its members are practically involved in politics and support political parties, NU maintains a commitment to Islamic values and their social role. (5) From the Reformation to Post-Reformation Era, NU experienced an evolution in its political approach. They support democracy, political pluralism, human rights, transparency, accountability and the fight against corruption. Apart from that, NU is involved in practical politics. Despite these distortions, NU continues to strive to maintain a balance between supporting the government and maintaining the integrity of Islamic values and their social role in Indonesian society

Riwayat Artikel:

Submissions : 06-12-2023
Accepted : 08-12-2023
Published : 23-12-2023

Keywords:

Political Doctrine,
Nahdlatul Ulama,
Indonesia

Kata Kunci :

Doktrin Politik,
Nahdlatul Ulama ,
Indonesia



Journal pages can be accessed
via this barcode

Abstrak:

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pergulatan doktrin politik Nahdlatul Ulama (NU) mulai dari masa Kolonial, Jepang, Era Kemerdekaan, Orde Baru, hingga Pasca Reformasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai sumber data sekunder, termasuk buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Temuan penelitian menunjukkan; (1) Pada masa penjajahan Belanda, doktrin politik NU mencerminkan strategi "Wait and See," dengan fokus pada perlindungan nilai-nilai agama Islam, penekanan pada identitas Islam di Indonesia, dan kerja sama dengan organisasi Islam lainnya dalam perjuangan kemerdekaan dan keadilan. (2) Masa penjajahan Jepang, NU beradaptasi dengan

perubahan politik. Awalnya, mereka berkolaborasi dengan Jepang, tetapi kemudian menjadi kritis terhadap kebijakan Jepang terutama terkait seikeirei yang bertentangan dengan prinsip tauhid Islam. NU menentang penindasan, menggunakan pendekatan diplomasi, dan membangun basis kekuatan di kalangan pesantren dan kyai. (3) Era Kemerdekaan, doktrin politik NU mencerminkan adaptasi terhadap perubahan situasi politik. Mereka mendukung kemerdekaan dan nilai-nilai Islam dalam negara yang pluralis, serta berperan dalam pemerintahan. Pasca-kemerdekaan, NU menghadapi berbagai tantangan, termasuk hubungan dengan pemerintah, politik nasional, dan peran agama dalam masyarakat modern. (4) Era Orde Baru, doktrin politik NU mengalami perubahan, dengan fokus pada kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan dakwah. Meskipun sebagian anggota terlibat dalam politik praktis dan mendukung partai politik, NU tetap menjaga komitmen pada nilai-nilai Islam dan peran sosial mereka. (5) Era Reformasi hingga Pasca Reformasi, NU mengalami evolusi dalam pendekatan politiknya. Mereka mendukung demokrasi, pluralisme politik, hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, dan perlawanan terhadap korupsi. Selain itu, NU terlibat dalam politik praktis. Meskipun terdapat distorsi, NU terus berusaha menjaga keseimbangan antara mendukung pemerintah dan mempertahankan integritas nilai-nilai Islam serta peran sosial mereka dalam masyarakat Indonesia.

PENDAHULUAN

Secara *de facto*, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi Islam yang diakui keberadaannya sejak adanya pengakuan keterlibatan mereka dari sisi partisipasi secara “Konvensional” (1938) dan “Non-Konvensional” (1946) oleh pemerintah. Dalam pergulatannya, NU memiliki kompilasi peran yang cukup berpengaruh baik itu di Masa Kolonial Belanda, Penjajahan Jepang, Masa Kemerdekaan, Pasca kemerdekaan, Masa Orde Baru, Masa reformasi hingga saat ini. (Haris, 2015).

Zubaidi, (2021) Pada awalnya, NU mendasarkan diri pada Doktrin *ahlussunnah wal jama'ah*. Dalam perjalanannya Doktrin tersebut diwujudkan dalam bentuk kesadaran spiritual, gerakan konkret dalam aspek sosial dan ekonomi, dan pada akhirnya mencerminkan kesadaran politik yang sesuai dengan sejarah organisasinya. Selain itu, dari sisi cita-citanya merujuk pada Khittah 1926, yang merupakan inti dari pendekatan NU. (Daud, 2021).

Selaras akan hal itu Rahardjo, (2001) mengklaim bahwa Nahdlatul Ulama menganut paham *ahlussunnah waljamaah*, yang merupakan suatu kerangka berpikir yang menempati posisi tengah (*tawasuth*) di antara pendekatan ekstrem yang bersifat rasionalis (*ekstrim aqli*) dan pendekatan yang bersifat skripturalis (*ekstrim naqli*). Unikny, sumber pemikiran Nahdlatul Ulama tidak hanya bersandar pada al-Qur'an dan hadis (sunah), tetapi juga menghargai peran akal dan pengamatan empiris dalam proses berpikir mereka. Pendekatan semacam ini merujuk kepada pemikiran tokoh-tokoh terdahulu seperti Abu Hassan Al-Asya'ri dan Abu Manur Al-Maturadi dalam konteks teologi. dalam (Hidayat, 2019).

Selanjutnya, Dalam konteks fiqh (hukum Islam), Nahdlatul Ulama cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan juga mengakui tiga mazhab lainnya, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. (Suhaendar, 2021). Hal ini menunjukkan kecenderungan mereka

untuk menjaga keragaman dalam pemahaman hukum Islam. Sementara dalam bidang tasawuf (*mysticisme Islam*), Nahdlatul Ulama mengembangkan metode yang terinspirasi oleh pemikiran Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Pendekatan ini mengintegrasikan antara aspek tasawuf (*mysticisme*) dan syariat (hukum Islam), menciptakan harmoni antara dimensi spiritual dan aspek hukum dalam praktik keagamaan mereka. (Hidayat, 2019).

Sekilas apabila di komparasikan dengan nilai ajaran islam, hal yang tidak dapat dinafikan pasti juga akan berkenaan dengan Muhamad SAW. Dimana, dia adalah Nabi yang telah berusaha membesarkan dan menyebarkan agama islam di segala penjuru Dunia. Salah satu ajaran yang begitu menarik perhatian adalah ajaran yang menanamkan doktrin untuk menciptakan keharmonisan antar perbedaan baik ras, golongan, agama dan budaya.

Representasi dari ajaran itu bisa dilihat pada pembukaan Piagam Madinah, secara tegas dinyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan inisiatif Muhammad SAW antara komunitas beriman dan muslim dari suku *Quraisy* dan *Yatsrib*, serta orang-orang yang bergabung dan berjuang bersama mereka. dalam dokumen itu terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka semua adalah satu umat yang berbeda dari umat manusia lainnya. (Anwar, 2018).

Piagam Madinah menegaskan bahwa setiap individu dan kelompok di kota Madinah memiliki jaminan hak, kebebasan, dan perlindungan atas kehidupan, harta, dan agamanya. Sebagai Implikasi dari ajaran ini,

banyak individu maupun kelompok (*organisasi*) mempraktekan dalam kehidupan mereka baik di lingkungan sosial, hingga pada level sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Michahel H. Hart Dalam bukunya yang berjudul *"The 100: A Ranking of the most influential persons in history"* yang dalam terjemahan bahasa indonesianya "100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia." dari beberapa tokoh yang masuk dalam daftar, terdapat 6 besar tokoh yang menempati urutan-urutan paling krusial pengaruhnya diantaranya; (1) Muhammad Saw. (2) Isaac Newton. (3) Yesus Kristus. (4) Buddha. (5) Konfusius dan (6) Santo Paulus. (Hart, 2009).

Dari tokoh-tokoh yang telah disebutkan, bukan hendak membatasi ataupun mendikotomi dari ajaran-ajaran yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh lainnya. Interpretasi semua ajaran yang dibawah dari ke-enam tokoh, peneliti meyakini semua mengandung unsur kebaikan bagi kemaslahatan hidup. Pun demikian, pada level keyakinan dan implementasi semua dikembalikan kepada penganutnya masing-masing.

Untuk Mereduksi kembali persoalan ajaran yang dibawah oleh Muhammad SAW, akan lahir pertanyaan Mengapa Nabi Muhammad Saw harus menempati urutan pertama sebagai tokoh paling berpengaruh serta apa relevansinya ajaran tersebut dengan Doktrin Politik.?

1) Alasan Pertama,

Muhammad Saw memainkan peran penting dalam perkembangan islam meskipun mendapatkan pertentangan dari keluarga, beserta sahabat-

sahabatnya. Yang pada akhirnya ajaran itu bisa diterima meskipun melewati proses perjalanan yang sangat panjang. Kemudian, Setiap ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh Muhammad Saw, semua unsur perkataanya dijadikan patokan dalam mengatur perilaku umat islam. Pun demikian dengan tindakannya, hingga saat ini banyak dipraktikkan dalam kehidupan sosial umat islam.

2) Alasannya *Kedua*,

Ajaran mengenai hidup dengan nuansa keberagaman dan mengedepankan asas kepentingan bersama juga telah terpatri dalam keorganisasian nahdlatul ulama (NU).

Dari penjelasan tersebut, setidaknya bisa diidentifikasi dua nilai yang sedang diperjuangkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU). *Pertama*, nilai etika. Etika yang dimaksudkan adalah ajaran Muhammad mengenai perilaku dan tindakan organisasi NU, yang bertujuan menjadi penyeimbang dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan dasar kultural Islam. *Kedua*, nilai estetika. Nilai ini mengacu pada bagaimana sistem pemerintahan negara Indonesia harus diposisikan sebagai negara Pancasila yang mampu mengakomodasi semua cita-cita yang diinginkan. Estetika dalam konteks ini mengacu pada keindahan dalam penyelenggaraan sistem tersebut.

Konstruksi bangunan argumentasi diatas juga bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Ridwan, (2014: 16) saat Hatta menerima kunjungan perwira Angkatan Laut Jepang yang menyampaikan kekhawatiran

penduduk Indonesia Timur, yang mayoritas beragama Kristen, terkait inklusi Piagam Jakarta dalam mukadimah Undang-Undang Dasar. Jika tidak ada perubahan, mereka lebih suka tetap berdiri di luar republik. dalam, (Hidayat, 2019)

Pada keesokan harinya, tanggal 18 Agustus, Hatta mengundang empat anggota PPKI yang dianggap mewakili Islam: Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Teuku Hassan, dan KH Wahid Hasyim. Semuanya setuju untuk menjaga kesatuan negara yang baru terbentuk ini. Sebagai solusi, KH Wahid Hasyim mengusulkan penyelarasan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menekankan keesaan Tuhan (tauhid) yang tidak ada dalam agama lain. Dengan demikian, Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi menjadi negara dengan keyakinan tunggal (*monoteis*). (Hidayat, 2019)

Jurdi, (2008) Mengacu pada realitas sejarah, Nahdlatul Ulama tidak pernah khawatir terkait sistem pemerintahan yang lebih menekankan aspek kebangsaan daripada basis agama. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, perdebatan tersebut dapat dimengerti dengan mudah. Hal ini dikarenakan dalam sejarah Nahdlatul Ulama, pada Mukhtamar ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 1935, organisasi tersebut memberikan pengakuan hukum terhadap "negara Islam" kepada Hindia Belanda yang saat itu masih dijajah oleh Belanda. Dengan dasar logika ini, menjaga kemerdekaan dengan persatuan, perdamaian, dan kerukunan dianggap lebih penting oleh Nahdlatul Ulama daripada usaha untuk

mendirikan Khilafah Islamiyah. dalam (Hidayat, 2019).

Menyikapi klaim diatas, Fealy, (2012) dikutip dari Rahman et al., (2020) Secara histori Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya atas inisiatif K.H. Wahab Chasbullah dan K.H. Hasyim Asy'ari. NU dibentuk sebagai sebuah jami'yah, yang merupakan sebuah organisasi yang mencakup aspek keagamaan dan sosial. Anggaran dasar NU menegaskan bahwa ketaatan terhadap ajaran salah satu madzhab (Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad) adalah hal yang sangat penting. Tujuan organisasi ini adalah untuk mematuhi salah satu dari empat madzhab tersebut dan melakukan segala hal yang bermanfaat bagi agama Islam.

Perjuangan politik Islam Sunni, NU mulai terlibat dalam politik pemerintahan Republik Indonesia. NU mengklaim bahwa organisasi memiliki tanggung jawab untuk melindungi Islam dan para pengikutnya. Oleh karena itu, NU berupaya memastikan bahwa ketenangan dan stabilitas masyarakat tetap terjaga, karena hal ini dianggap sebagai prasyarat untuk menciptakan ketaatan dan kerukunan di antara umat. (Rahman et al., 2020).

Salah satu doktrin yang sangat terkenal bagi organisasi Nahdlatul Ulama (NU) adalah Doktrin Politik Kebangsaan. (Zainuri, 2021); (Zahratana & Ridho, 2023); (Ahmad Rofii, 2014) Secara Titahnya, yang dimaksud dengan doktrin politik kebangsaan yaitu penekanan terhadap komitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta

peran aktif dalam membentuk karakter bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.

Selanjutnya, Feillard, (2017) Prinsip doktrin politik NU mengikuti ketentuan dan doktrin agama Islam, dengan tujuan untuk menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, dengan prinsip ahlusunnah wal jamaah. Salah satu praktek yang dijunjung tinggi adalah penghargaan terhadap warisan budaya yang memiliki nilai positif, sambil mendorong masyarakat untuk tetap berperilaku sesuai dengan konteks ke-Indonesia-an yang identik dengan kerendahan hati dan sikap saling menghargai serta memperjuangkan kemakmuran umat. dalam (Sariroh et al., 2022).

Namun realitas justru berbanding terbalik dengan adanya dinamika zaman. Pada masa penjajahan Belanda, Jepang, Masa Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan, Masa Orde Baru hingga masa reformasi sampai dengan saat ini, doktrin politik NU menuai kedilematasian bagi para pengikutnya. Hal itu dikarenakan Doktrin yang digagas lenyap dalam pusaran akibat bias elit Politik NU yang condong mementingkan kepentingan golongan tertentu.

Kalim tersebut juga bersesuaian dengan pernyataan (Masdar, 2010) banyak elite NU terjerumus dalam politik praktis. Sejumlah fungsionaris NU di berbagai daerah tengah berlomba-lomba meraih kekuasaan atau terlibat dalam permainan kepentingan politik. Akibatnya, NU semakin terjebak dalam politik praktis, yang mengakibatkan kesenjangan antara NU dan warga Nahdliyin semakin melebar. Muhammad, (2017)

memberikan penekanan adanya Perubahan dalam pandangan doktrin politik Nahdlatul Ulama (NU) sangat dipengaruhi oleh hasil dari interaksi antara faktor-faktor sosial dan budaya, serta kondisi politik yang mempengaruhi proses transformasi politik dalam sejarah NU.

Dapat dipahami, Nu adalah organisasi yang bersifat dinamis bukan statis. Setiap peristiwa yang terjadi direduksi dan disesuaikan dengan nilai yang berkembang. untuk itu, Berdasarkan analisis konstruksi peristiwa yang telah diuraikan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan Doktrin politik Nahdlatul Ulama (NU) dari masa Orde Baru hingga era pasca reformasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Zed, (2004) Metode ini melibatkan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini serta mengkomparasikan dengan penelitian terdahulu. Terdapat empat tahap utama dalam pelaksanaan studi pustaka dalam penelitian ini, yaitu persiapan alat dan bahan yang diperlukan, penyusunan daftar pustaka, pengaturan jadwal, serta membaca dan mencatat materi penelitian. Dalam (Adlini et al., 2022).

Sumber data penelitian ini yakni data sekunder (*data kedua*) dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Bahan pustaka yang ditemukan dari berbagai referensi ini kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung

proposisi dan gagasan yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk teknis analisis data meliputi; (1) Reduksi Data. Artinya, proses menyederhanakan dan menghilangkan data yang tidak relevan. (2) Penyajian Data. Yaitu konsep pengorganisasian data dalam format yang jelas dan mudah dimengerti. (3) Kesimpulan atau Verifikasi. Dimana, tahap akhir yang melibatkan interpretasi hasil penelitian dan memastikan bahwa kesimpulan didukung oleh data yang ada.

Setelah melakukan teknik analisis data sekunder proses terakhir yang dilakukan meliputi; (1) Triangulasi Sumber. Proses ini melibatkan perbandingan dan analisis berbagai teori yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. (2) Triangulasi waktu. Tahap mencakup pengamatan berulang yang dilakukan pada berbagai waktu yang berbeda untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian. (3) Triangulasi teori. Artinya penelitian ini melibatkan perbandingan teori-teori yang relevan untuk memberikan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian. Terakhir, (5) Triangulasi metode. Yaitu tahapan terakhir penggabungan berbagai teknik pengumpulan data untuk memverifikasi temuan penelitian.

Prinsip triangulasi data digunakan sebagai kerangka kerja untuk memastikan keabsahan data yang digunakan, dengan merujuk pada fenomena yang sedang diinvestigasi. Danzin, Cohen, dan Manion yang dikutip oleh Alwasilah (2008) dalam Bachri (2010) menyatakan bahwa bukti dalam penelitian akan menjadi lebih kuat jika temuan data yang dianalisis mendapatkan konfirmasi

atau kesesuaian informasi dari berbagai sumber informasi yang berasal dari informan yang berbeda. dalam (Sahi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsiran Doktrin dan Refleksi

Doktrin berasal dari kata Yunani, *dogmata*, yang merujuk pada keyakinan atau ajaran yang diyakini dan dianut oleh suatu agama atau organisasi serupa untuk menegaskan otoritasnya. Penggunaannya bisa melibatkan bukti, analisis, atau fakta, tergantung pada konteksnya. (Tambunan, 2019).

Criswell, (1956) menganggap doktrin sebagai kerangka tulang yang membentuk tubuh manusia, dan praktik-praktik kita dalam kehidupan sehari-hari adalah daging yang melingkupi tulang tersebut, menciptakan keindahan. Menurutnya, doktrin mirip dengan kerangka tulang yang esensial, dan tanpanya, manusia akan kehilangan kebutuhan pentingnya, seperti kerang yang kehilangan tulangnya. dalam (Tambunan, 2019). Dapat dimaknai, Doktrin merupakan serangkaian prinsip atau pandangan yang digunakan sebagai dasar untuk memandu tindakan, keputusan, atau kebijakan dalam suatu bidang tertentu.

Selanjutnya, Refleksi adalah proses di mana seseorang memikirkan atau merenungkan pengalaman, peristiwa, atau situasi tertentu dengan tujuan untuk memahami lebih dalam tentang diri mereka sendiri, perasaan, pikiran, atau tindakan mereka. Refleksi seringkali dilakukan dengan

cara memeriksa pengalaman masa lalu atau situasi saat ini untuk mengevaluasi apa yang telah terjadi, apa yang telah dipelajari, dan bagaimana hal itu mempengaruhi diri seseorang.

Vera, (2017) Refleksi dapat dimaknai sebagai "pemantulan kembali," yang mirip dengan pengulangan kata-kata, seperti yang terdapat dalam hadis Bukhari r.a. Rasulullah juga menggunakan pendekatan ini dalam berdakwah, mengulang kalimatnya dua hingga tiga kali untuk memudahkan pemahaman, sesuai dengan tujuan teknik refleksi. Hal serupa terlihat dalam Surah Ar-Rahman Al-Qur'an, di mana satu ayat diulang sampai tiga puluh satu kali sebagai bentuk refleksi.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disajikan, dapat diperinci bahwa doktrin politik NU dapat diinterpretasikan sebagai struktur pokok yang memberikan pedoman dan kekuatan pada organisasi tersebut selama sejarah Indonesia, mencakup masa kolonial, pendudukan Jepang, kemerdekaan, era Orde Baru, dan periode reformasi. Dalam konteks ini, refleksi terhadap doktrin politik NU dapat dimaknai sebagai proses kritis untuk mempertimbangkan kembali nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip inti yang menjadi dasar keterlibatan NU dalam ranah politik sepanjang sejarahnya.

Doktrin Politik NU di Masa Kolonial Belanda.

Doktrin politik NU di masa kolonial Belanda, mengacu pada pemikiran dan tindakan yang diambil oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai respons terhadap situasi politik dan sosial yang

dihadapi oleh bangsa Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Refleksi ini mencakup sikap dan prinsip-prinsip politik yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan NU pada masa tersebut.

Pemikiran retrospektif yang melibatkan penilaian dan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana NU merespons kolonialisme Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan serta nilai-nilai Islam selama periode tersebut. Refleksi inipun mencakup evaluasi tentang bagaimana NU memperjuangkan kebebasan, mengadvokasi toleransi antar agama, serta berperan dalam politik dan pendidikan di masa kolonial tersebut.

Andree Feillard, (1999) pada masa kolonial, doktrin yang digunakan Nahdlatul Ulama (NU) mengadopsi pendekatan "*Wait and See*" terhadap situasi politik nasional, dan ketika mereka mengeluarkan pernyataan politik, NU cenderung mendukung pemerintah Belanda. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa NU tidak memiliki sikap tegas terhadap pemerintahan kolonial. Sikap tegas tersebut hanya muncul ketika Belanda campur tangan dalam masalah agama. Sebagai contoh, pada tahun 1931, NU mengirim protes terhadap kebijakan yang mencabut kewenangan pengadilan agama dalam kasus warisan, yang pada gilirannya memberikan otoritas kepada hukum adat. (Haris, 2015).

Di Lain sisi, Haidar, (1994) juga memberikan komparasi mengenai doktrin NU dengan tegas menentang sebuah usulan undang-undang perkawinan dan mengajukan permintaan agar penghulu yang dipilih

didasarkan pada pertimbangan dari ulama setempat, karena mereka dianggap sebagai pihak yang dapat menilai kemampuan dan kualifikasi seseorang untuk menjadi penghulu. dalam (Haris, 2015).

Oleh karena itu, Pada tahun 1936, dalam Muktamar di Banjarmasin, NU mengambil keputusan bahwa Indonesia dianggap sebagai dar al-Islam (negara Islam). Keputusan ini didasarkan pada persepsi bahwa mayoritas penduduk di negeri ini memeluk agama Islam dan bahwa wilayah ini pernah diperintah oleh raja-raja Muslim.

Akibat ketidakpuasan NU dan organisasi Islam lain terhadap kebijakan kolonial Belanda, muncul keinginan untuk membentuk sebuah Front Bersama guna memperkuat komunikasi dan musyawarah yang lebih teratur. Hasil kesepakatan ini kemudian melahirkan sebuah konfederasi bernama MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia).

Doktrin politik Nahdlatul Ulama (NU) selama masa penjajahan Belanda mencerminkan seperangkat nilai yang menjadi dasar tindakan mereka. Dalam doktrin ini, penekanan diberikan pada sikap bijaksana dan kewaspadaan dalam merespons situasi politik, yang dijelaskan melalui pendekatan "*Wait and See*," yang artinya, menunggu dan melihat. Pendekatan ini mengacu pada praktik menunggu untuk memahami tindakan yang akan diambil oleh pihak penjajah dan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya dalam merespons situasi politik yang berkembang.

Olehnya, NU sangat memperhatikan dan mempertahankan nilai-nilai agama Islam, menentang campur tangan kolonial dalam

masalah agama, dan menekankan pentingnya ulama setempat dalam menilai kemampuan individu. Doktrin ini juga mencerminkan perjuangan untuk menjaga integritas agama, mencari keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan dalam konteks penjajahan Belanda. Dengan demikian, doktrin politik NU selama masa kolonial mencerminkan keseimbangan antara kebijaksanaan, perlindungan nilai agama, dan perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan.

Doktrin Politik NU di Masa Penjajahan Jepang.

Doktrin politik NU di masa penjajahan Jepang mencerminkan adaptasi organisasi Nahdlatul Ulama terhadap perubahan situasi politik selama Perang Dunia II. Awalnya, NU berkolaborasi dengan Jepang dalam harapan mendukung nilai-nilai Islam dan kesejahteraan rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin kritis terhadap kebijakan Jepang yang tidak selalu mengakomodasi nilai-nilai mereka.

Lathiful Khuluq, (200) Hubungan dengan Jepang menjadi tegang saat pemerintah Jepang memerintahkan rakyat Indonesia untuk melaksanakan seikeirei, sebuah ritual yang melibatkan membungkuk ke arah kaisar Tenno Haika, yang dipandang sebagai keturunan Dewi Matahari, pada pagi hari. Ritual ini menimbulkan perlawanan dari umat Muslim, karena dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid. Protes terhadap tuntutan ini muncul di seluruh penjuru.

Akibatnya, K.H. Hasyim Asy'ari sendiri dihukum empat bulan penjara oleh pemerintah Jepang, dengan tuduhan sebagai pemimpin

kerusuhan di pabrik gula Jombang. Alasan ini sebenarnya direkayasa oleh Jepang dan terkait dengan penolakan K.H. Hasyim Asy'ari terhadap seikeirei. Kasus ini kemudian mendapat protes tegas dari pejabat Nahdlatul Ulama (NU) yang disampaikan kepada pihak Jepang. (Haris, 2015).

Selaras akan hal itu, Kuntowidjoyo, (1997) Pada bulan Maret 1942, ketika Nippon mengambil alih pemerintahan dari Belanda di Indonesia, kedatangan Jepang awalnya disambut dengan antusiasme oleh seluruh bangsa Indonesia. Namun, perasaan positif ini segera berubah menjadi kebencian yang mendalam ketika terungkap bahwa Jepang tidak terbukti lebih manusiawi daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang terbukti bersikap lebih kejam dan brutal, tidak ragu untuk menghukum siapa pun yang dianggap bersalah tanpa memandang siapa mereka. (Haris, 2015).

Atas dasar itulah, Imamah, (2015) mengemukakan Nahdlatul Ulama (NU) sangat memberikan kontribusi signifikan dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia selama masa penjajahan Jepang. Dengan jaringan yang sangat luas hingga ke tingkat desa, NU menggunakan pendekatan dakwah untuk membangun basis kekuatan di kalangan pesantren dan kyai, dengan tujuan untuk kemudian menggunakannya dalam perlawanan terhadap penjajahan.

Dalam konteks ini, NU tidak mengadopsi posisi yang berlawanan secara langsung, melainkan mengadopsi pendekatan diplomasi yang lebih halus terhadap politik Jepang yang mencoba memanfaatkan Islam

untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka, terutama dalam hubungannya dengan kekuatan Barat.

Pada level doktrin politik di masa penjajahan jepang, dapat ditarik benang merah bahwa Doktrin politik Nahdlatul Ulama (NU) selama masa penjajahan Jepang mencerminkan komitmen kuat mereka terhadap prinsip tauhid dalam Islam, yang memandang tuntutan seikeirei sebagai pelanggaran terhadap keyakinan agama. NU juga mengadopsi pendekatan diplomasi yang lebih halus dalam berhadapan dengan politik Jepang yang berusaha memanfaatkan Islam untuk kepentingan mereka.

Mereka menentang penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang tercermin dalam oposisi mereka terhadap kasus penahanan K.H. Hasyim Asy'ari. Selain itu, NU menggandeng pesantren dan kyai untuk membangun basis kekuatan, mencerminkan peran penting pendidikan Islam dan pemimpin agama dalam perjuangan politik mereka. Doktrin politik NU selama masa penjajahan Jepang mencerminkan upaya mereka untuk menjaga integritas agama dan nilai-nilai mereka sambil berjuang untuk keadilan dan kemerdekaan.

Doktrin Politik NU di Masa Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan RI

Kontribusi doktrin Nu kepada pengikutnya selama fase-fase perjuangan kemerdekaan ditandai dengan peristiwa Bom Atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki tepatnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Atas insiden ini, Jepang menyerah kepada sekutunya tanggal 15

agustus 1945. Sutopo, (1998); Kuntowijoyo, (1997); Martin Van Bruinessen, (1994) Pun demikian, menyerahnya Jepang bukan serta merta memberikan kemerdekaan begitu saja kepada Indonesia. Sebab setelah peristiwa itu kontak senjata antara Jepang dan pejuang Republik masih terjadi. ditambah Belanda memanfaatkan kejadian itu dengan kembalinya mereka di Jakarta pada tanggal 29 September 1945 yang membawa pasukan sekutu dengan tujuan untuk mengembalikan kolonialisme mereka di Indonesia. Hal inilah, cikal bakal muncul kesadaran masyarakat Indonesia bahwa "Kemerdekaan Bukan Pemberian Melainkan, Harus ada konsistensi perjuangan". *"Independence is not a gift, but rather, there must be consistency in the struggle."* dalam (Haris, 2015).

Mengamati situasi ini, pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan untuk mengumpulkan cabang-cabang NU di seluruh Jawa dan Madura untuk membahas pendekatan terhadap kehadiran Belanda. Pada tanggal 21-22 Oktober 1945, diadakan pertemuan para konsul di kantor Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama yang dipimpin langsung oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Hasil pertemuan ini adalah penerbitan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia harus mengambil tindakan tegas terhadap Belanda, sambil bersedia berjuang secara gigih untuk mempertahankan kemerdekaan. (Haris, 2015).

Resolusi jihad ini memiliki dampak yang sangat besar, karena pesannya menegaskan bahwa melawan Belanda adalah suatu kewajiban yang harus diemban.

Akhirnya, semangat jihad melawan pasukan sekutu dan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) berkobar di seluruh Jawa dan Madura, terutama di Surabaya, di mana semangat perlawanan merebak di berbagai pesantren dan komunitas.

Refleksi doktrin politik NU di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia mencerminkan evolusi dan adaptasi pandangan politik organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam lingkungan yang terus berubah. Pada awal masa kemerdekaan, NU mendukung negara baru Indonesia dan ikut berperan dalam proses pembentukan pemerintahan serta konstitusi negara. Mereka tetap menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kerangka negara yang pluralis.

Selama periode pasca kemerdekaan, NU menghadapi tantangan seperti hubungan dengan pemerintahan, peran dalam politik nasional, dan peran agama dalam masyarakat modern. NU mempertahankan peran sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, dan sementara beberapa fraksi NU terlibat dalam politik, organisasi ini juga tetap berkomitmen untuk pendidikan, kesejahteraan sosial, dan promosi toleransi agama.

Di era kemerdekaan juga, adalah Puncak hubungan antara Nahdlatul Ulama dan Sukarno mencapai titik penting setelah Nahdlatul Ulama memperoleh kursi Wakil Perdana Menteri, yang dipegang oleh Zainul Arifin, dalam kabinet yang dipimpin oleh PM Ali Sastroamijoyo dari PNI. Momentum penting lainnya terjadi pada akhir tahun 1953 dalam konferensi para ulama di Cipanas, yang juga dikenal sebagai Mukhtar Alim Ulama se-

Indonesia. Dalam pertemuan ini, para ulama menyepakati memberikan gelar kepada Soekarno sebagai "*Waliyul Amri Dharuri Bis Syaukati*." Artinya, mereka mengakui bahwa pemerintahan saat itu memiliki otoritas yang sangat besar dan penting dalam berbagai aspek kehidupan. (Hidayat, 2019).

Keputusan ini menandai tingkat dukungan dan pengakuan resmi yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama kepada pemerintahan Sukarno. Dalam konteks sejarah, ini mencerminkan hubungan erat antara NU dan pemimpin nasional yang sangat berpengaruh ini, yang pada gilirannya memengaruhi dinamika politik dan agama di Indonesia pada masa itu. Sehingga, Refleksi doktrin politik NU di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan mencerminkan upaya untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam konteks negara yang demokratis dan multikultural, serta mengejar tujuan kesejahteraan umat Islam dan masyarakat secara lebih luas.

Doktrin Politik NU di Masa Orde Baru

Haidar, (1994) Perubahan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik Nahdlatul Ulama (NU). Meskipun perubahan ini terjadi secara bertahap, pengaruh Orde Baru juga membawa perubahan dalam model politik organisasi tersebut. Orde Baru, terutama setelah berhasil mengatasi ancaman komunis, fokus pada pelaksanaan pembangunan ekonomi. Menurut pandangan Orde Baru, orientasi politik yang didasarkan pada ideologi yang beragam dianggap sebagai pemicu konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, orientasi politik yang mendasarkan diri pada

ideologi dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. dalam (Daud, 2021).

Pandangan Hikam, (1996) Politik NU di Masa Orde Baru Secara sejarah, peran sentral agama telah memainkan peran dalam memotivasi tindakan sosial dan politik yang bertujuan melawan dominasi kekuasaan politik dan ideologi negara yang sangat mendominasi. Selama masa kolonial, ada banyak gerakan sosial yang berakar pada nilai-nilai agama dan bertujuan untuk menantang hegemoni negara serta memperjuangkan kehadiran mereka dalam ranah sosial dan politik begitupun dengan NU. Meskipun sebagian besar gerakan ini tidak memiliki struktur organisasi yang kuat dan seringkali tidak sistematis, pentingnya sebagai bentuk perlawanan sosial yang berasal dari komunitas keagamaan, khususnya komunitas pesantren, tidak dapat diabaikan. Gerakan-gerakan ini menunjukkan kapasitas mereka untuk melawan dominasi ideologi dan praktik-praktik negara. dalam (Haris, 2015).

Menyoroti hal itu Sitempul, (1989) Satu momen bersejarah yang sangat penting dalam perjalanan NU adalah keputusannya untuk kembali mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Khittah 1926, yang kemudian diperkuat oleh Keputusan Mukhtar NU di Situbondo pada tahun 1984. Di tengah perubahan dinamika di bawah pemerintahan Orde Baru, NU mulai mengubah orientasi politiknya untuk lebih fokus pada kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan dakwah. Perubahan orientasi ini bisa dianggap sebagai langkah menuju pengembangan masyarakat Islam yang lebih luas, yang mengarah pada

model pengembangan masyarakat Islam yang komprehensif. dalam (Daud, 2021).

Namun, masa orde baru fakta yang tidak bisa dinafikan adalah terjadi transisi mengenai doktrin politik Nu. Hal itu terjadi, karena sebagian orang dari kalangan Nu mulai mengikuti politik praktis. Perjalanan politik Nahdlatul Ulama (NU) mengalami konvergensi dan hampir tidak dapat dihentikan selama periode 1955-1982, yang melibatkan partisipasi aktif dalam politik praktis. Kesadaran muncul bahwa terlalu banyak keterlibatan organisasi dalam politik praktis, atau dengan kata lain, menjadi terlalu terlibat dalam partai politik, berpotensi mengurangi semangat atau spiritualitas agama yang sebelumnya menjadi fokus utama. Namun, perlu dicatat bahwa keterlibatan awal NU dalam politik didasarkan pada aspirasi politik umat Islam.(Daud, 2021).

Greg Barton, (2006) Perkembangan menarik yang dapat diamati dalam perkembangan organisasi ini adalah semangat intelektual yang tumbuh di kalangan pemuda Nahdlatul Ulama (NU), yang secara progresif beralih dari lingkungan pesantren ke aktivisme gerakan pemuda. Pertumbuhan intelektual ini sangat dipengaruhi oleh Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai Gus Dur, dan banyak pengamat melihatnya sebagai pendorong utama bagi perkembangan intelektual pemuda NU. dalam (Daud, 2021).

Puncaknya, periode antara 1994-1999 dapat dianggap sebagai periode di mana doktrin strategi kemandirian diterapkan dengan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi kekuasaan ganda. Upaya

pemberdayaan saat itu difokuskan pada masyarakat sipil dan kesadaran masyarakat terkait dengan penerimaan sistem multi-partai dalam konteks kebangsaan dan negara.

Dengan demikian, isu pemberdayaan menjadi fokus utama dalam memajukan masyarakat sipil melalui pemahaman tentang pluralitas partai politik. Secara internal, dalam menyikapi era reformasi, NU memilih pemisahan tugas antara tugas politik, yang diwujudkan melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan tugas sosial-keagamaan, yang tetap menjadi fokus organisasi NU. Hal ini mencerminkan reorientasi strategi yang dilakukan oleh NU dalam menghadapi perubahan zaman. (Daud, 2021).

Secara keseluruhan Doktrin politik Nahdlatul Ulama (NU) di masa Orde Baru mencerminkan komitmen organisasi ini untuk mendukung ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menjaga nilai-nilai toleransi, kerukunan antar agama, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. refleksi ini juga mencerminkan dinamika internal dalam NU, di mana beberapa anggotanya merasa kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan umat Islam. Seiring perjalanan waktu, NU terus berupaya untuk menjaga keseimbangan antara mendukung pemerintah dan mempertahankan integritas nilai-nilai Islam serta peran sosial mereka dalam masyarakat Indonesia.

Doktrin Politik NU di Masa Reformasi Hingga Pasca Reformasi

Doktrin politik Nahdlatul Ulama (NU) di masa Reformasi mencerminkan evolusi yang

signifikan dalam pendekatan organisasi ini terhadap isu-isu politik dan sosial di Indonesia selama periode tersebut. Pada era Reformasi yang ditandai dengan perubahan politik dan sosial, NU mengalami transformasi dalam pandangan dan tindakan politiknya. Mereka menjadi semakin terbuka terhadap konsep demokrasi, pluralisme politik, dan hak asasi manusia. NU mendukung prinsip-prinsip demokrasi, memperjuangkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan perlawanan terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

Suhaendar, (2021) Gerakan reformasi muncul sebagai respons terhadap berbagai krisis yang telah merusak berbagai aspek kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan sosial adalah faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi indikator penting. Oleh karena itu, reformasi dianggap sebagai gerakan yang tak bisa lagi dikompromikan, sehingga hampir seluruh masyarakat Indonesia sepakat dan mendukung gerakan ini sepenuhnya. Reformasi melibatkan perubahan dari sistem lama menuju tatanan kehidupan yang baru yang lebih sesuai dengan hukum dan bertujuan untuk perbaikan. Peletakan dasar harus adanya reformasi dikarenakan ada beberapa organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) juga terkena implikasi dari masa Orde Baru.

Mansyur, (1998); Noor, (2010) berkesimpulan yang sama masa reformasi, rakyat Indonesia menuntut beberapa hal diantaranya; (1) Pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju

perbaikan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. (2) Mereka menginginkan kehidupan yang aman, tenteram, dan damai, tanpa terlalu mempermasalahkan siapa yang menjadi pemimpin, asalkan ada keadilan, kemakmuran, dan perhatian terhadap kesulitan masyarakat kecil serta penanganan krisis sosial. dalam (Suhaendar, 2021).

Transformasi mengenai doktrin politik masih terus berlangsung, terutama dalam aspek Partisipasi dan Budaya Politik. Perdebatan mengenai perubahan nilai-nilai doktrin ini juga menimbulkan ketidakpastian, contohnya PKB yang sebagai representasi dari Silsilah NU mengalami distorsi dan perpecahan baik di tingkat internal (*NU Struktural*) maupun di kalangan pengikutnya (*NU Kultural*). Sejak era reformasi hingga saat ini, NU semakin menunjukkan fokus perjuangannya yang tidak hanya terbatas pada politik identitas, tetapi juga semakin mendekati politik praktis.

Keterlibatan NU dalam politik praktis didasarkan pada alasan tertentu. dimana, asumsi yang lahir ialah melalui jalur politik, pengakomodasian kepentingan kesejahteraan umat Muslim, terutama bagi NU, menjadi semakin terbuka. Sebagai implikasinya, persoalan menyangkut politik praktik juga merongrong tubuh nahdlatul ulama (NU). Selaras akan hal itu, Hidayati (2015) Berawal sebagai organisasi Islam yang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan sejak tahun 1926, NU tidak hanya berperan dalam konteks keagamaan tetapi juga terlibat secara aktif dalam perjuangan kemerdekaan pada era

kolonial. Selama era reformasi, NU tertarik untuk terlibat dalam politik praktis dan bahkan mengalami transformasi menjadi partai politik,

Atas hal itu, Selama masa reformasi di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) mengadopsi doktrin politik yang mencerminkan keterbukaan terhadap nilai-nilai demokrasi, pluralisme politik, dan hak asasi manusia. Organisasi ini mendukung prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan perlawanan terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Transformasi doktrin politik NU dalam era reformasi juga mencakup keterlibatan aktif dalam politik praktis, dengan tujuan mengakomodasi kepentingan kesejahteraan umat Muslim melalui jalur politik. Meskipun NU mengalami distorsi dan perpecahan dalam perubahan nilai-nilai doktrin, namun organisasi ini terus menunjukkan fokus perjuangan yang tidak hanya terbatas pada politik identitas, melainkan semakin mendekati politik praktis.

SIMPULAN

Doktrin Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia mengalami perkembangan yang mencerminkan dinamika sejarah dan perubahan kontekstual. Untuk itu, Doktrin Nahdlatul Ulama (NU) dapat dirangkum dalam beberapa prinsip inti. *Pertama*, NU menekankan pentingnya Islam yang rahmatan lil-alamin, menjadi sumber inspirasi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. *Kedua*, NU memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan dalam kerangka negara hukum yang demokratis, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila. *Ketiga*, NU

menegaskan peran sentral pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengembangan karakter. *Keempat*, NU mendorong toleransi antar agama dan kerukunan umat beragama sebagai fondasi keberagaman Indonesia. *Kelima*, NU berkomitmen pada kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, dengan memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Doktrin ini mencerminkan kesiapan NU dalam merespons perubahan zaman dan tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan umat dan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Ahmad Rofii. (2014). Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama Perspektif Pemikiran Kh. Abdul Muchith Muzadi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(2), 388–409.
- Anwar, C. (2018). Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 1.
- Daud, S. (2021). *Re-Orientasi Politik Nu*. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (Kdt) Re-Orientasi.
- Haris, M. (2015). Partisipasi Politik Nu Dan Kader Muslimat Dalam Lintas Sejarah. *Al-Tahrir*, 15(284–306).
- Hidayat, A. (2019). Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966). *Herodotus: Jurnal Pendidikan Ips*, 2(3), 272–282.
- Hidayati, A. (2015). *Nahdlatul Ulama (Nu) Di Era Reformasi: Studi Tentang Muslimat Nu Periode 2011-2014 Dan Khittah Nu 1926*. [Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/30321](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/30321)
- Imamah, D. M. (2015). Da ' Wah Strategy Nahdlatul Ulama (Nu) In Japanese Occupation Era. *Jurnal Bimas Islam*, 8(11), 163–199.
- Masdar, H. (2010). Reformulasi Teologi Politik Nu. *Repository Unisa*, 176–190.
- Michael H. Hart. (2009). *100 Tokoh Paling Berpengaruh Di Dunia*. Penerbit. Noura Books (Pt Mizan Publik) Jakarta.
- Muhammad, F. (2017). Dinamika Pemikiran Dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama. *Kalam*, 10(2), 57.
- Rahman, A., Nurlela, N., & Rahmawan, A. D. (2020). Relasi Islam Kultural Dan Politik Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 15(1), 69. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i1.13431>
- Sahi, Y., Kamuli, S., & Djaafar, L. (2023). Criminological Review Of Commercial Sex Workers Regarding The Misuse Of Michat And Prevention Efforts In The City Of Gorontalo. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1140–1147.
- Sariroh, S., Ali, M., Amri, A., & Syakur, A. (2022). Doktrin Keagamaan Nahdlatul Ulama Sebagai Role Model Toleransi Umat. *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(2), 102–

- Suhaendar, M. (2021). Peranan Kh. Hasyim Muzadi Dalam Mengembangkan Nu Pada Era Reformasi Tahun 1999-2004. In *Uin Smh Banten*.
- Tambunan, F. (2019). Doktrin Pentingkah?: Minimnya Pemahaman Jemaat Gereja-Gereja Protestan Di Sumatera Utara Tentang Doktrin-Doktrin Dasar Dalam Kekristenan. *Illuminate: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2(1), 14–28. <https://E-Journal.Sttbaptis-Medan.Ac.Id/Index.Php/Illuminate/Article/View/53>
- Vera, S. (2017). Konsep Keterampilan Refleksi Dalam Konseling Konvensional Menurut Perspektif Islam. In *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*. [Http://Www.Albayan.Ae](http://Www.Albayan.Ae)
- Zahratana, A., & Ridho, M. I. (2023). Membaca Politik Kebangsaan Nu Dan Muhammadiyah. *Mozaic: Islamic Studies Journal*, 2(1), 10–19.
- Zainuri, A. (2021). Doktrin Kultural Politik Nu. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 18(2), 176–190.
- Zubaidi, A. (2021). Ahlussunah Wal Jamaah ' S Political Practices In Post-Reform Indonesia Praktik Politik Ahlussunah Wal Jamaah Di Namun Indonesia Bukan Negara Islam . Hal Ini Menjadi Menarik Karena Sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Di Dunia Tetapi Indonesia Tidak . 2(2), 273–296.